



DIALEKTIKA

Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya

ISSN: 2338-2635; e-ISSN: 2798-1371

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL SEBAGAI SARANA MEMBANGUN INTEGRITAS BANGSA

Ramot Peter¹, Masda Surti Simatupang²

¹Character Building Development Center, Information Systems Department, School of Information Systems, Bina Nusantara University, Jakarta, Indonesia

ramot.peter@binus.ac.id*

²Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Sastra dan Bahasa, Universitas Kristen Indonesia.

masdasimatupang@uki.ac.id

Abstrak

Indonesia dikenal oleh masyarakat dunia sebagai negara yang kaya akan keberagaman suku, agama, Bahasa dan budaya. Keberagaman yang dimiliki Indonesia merupakan kekayaan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ada banyak konflik yang terjadi sebagai dampak dari perbedaan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sehingga mengganggu ketahanan bangsa. Konflik di tengah keberagaman tidak boleh dibiarkan sehingga perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Pembahasan dalam artikel ini menggunakan metode kajian studi pustaka membahas fenomena yang terjadi berdasarkan kajian-kajian ilmiah yang telah ada dengan cara membaca, mencatat, dan mengolah bahan-bahan penelitian yang telah dipublikasi sebelumnya baik berupa buku, artikel jurnal, maupun teks lainnya. Adapun tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan konsep pendidikan multikultural di tengah keberagaman masyarakat Indonesia serta proses pelaksanaan pembelajaran. Pendidikan multikultural merupakan satu metode pembelajaran yang bertujuan untuk menyatukan bangsa secara demokratis, dengan menekankan pada perspektif pluralitas masyarakat di berbagai bangsa, etnik, kelompok budaya yang berbeda. Proses pembelajaran pendidikan multikultural mengembangkan dan merencanakan suatu proses pembelajaran yang berafiliasi pada pendidikan berbasis multikultural dengan memasukkan materi pembelajaran yang relevan dengan unsur-unsur terkait. Guru sebagai garda depan dalam proses belajar mengajar mempunyai peran strategis dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan pembelajaran yang berafiliasi Pendidikan berdasarkan multicultural dengan memberikan materi pelajaran yang berkaitan dengan Pendidikan multicultural. Tujuannya yaitu untuk membiasakan siswa didik menghargai perbedaan, berpikir kreatif dan bekerja sama dengan siswa-siswa lainnya dalam satu tim.

Kata kunci: Pendidikan multikultural, Integritas bangsa, SARA, masyarakat majemuk

Abstract

The international community recognizes Indonesia as a country rich in ethnic, religious, linguistic, and cultural variety. The diversity that Indonesia possesses is a blessing from God Almighty. Many disputes develop as a result of ethnicity, religion, race, and intergroup (SARA) divisions, which damage the nation's resiliency. Conflicts cannot be tolerated in the midst of diversity, hence diverse measures must be done to overcome them. The literature review method is used in this article to explore events that emerge as a result of current scientific investigations by reading, documenting, and analysing previously published research materials in the form of books, journal articles, and other publications. The goal of this article is to illustrate the idea of multicultural education in the context of Indonesian society's variety, as well as the process of applying learning. Multicultural education is a learning technique that tries to unite the nation in a democratic manner by highlighting the plurality of people's perspectives from many nations, ethnicities, and cultural groups. The multicultural education learning process builds and plans a learning process associated with multicultural-based education by incorporating appropriate learning resources with related elements. Teachers, as the forefront in the teaching and learning process, have a strategic role in planning, executing, and developing learning associated with multicultural based education through offering multicultural education subject matter. The goal is to familiarize students used to respecting diversity, thinking creatively, and working in groups with other students.

Keywords: Multicultural education, national integrity, conflict, plural society

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan bangsa yang memiliki beranekaragam suku, budaya, bahasa, dan agama. Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010, ada sejumlah 1340 suku bangsa yang hidup di Indonesia. Untuk keragaman bahasa, ada sejumlah 750 bahasa daerah berdasarkan data dari hasil survei Statistik Kebahasaan pada tahun 2019 yang dilakukan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan keragaman agama, ada sejumlah 6 agama yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.1/Pnps/1965, yaitu: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu. Menurut data hasil survei Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2021, penduduk Indonesia berjumlah 272,32 juta jiwa dengan rincian sebagai berikut: Islam (86,88%), Kristen (7,49%), Katolik (3,09%), Hindu (1,71%), Buddha (0,75%), Konghucu (0,03%), dan 0,05% agama lainnya. Keberagaman tersebut menunjukkan betapa kayanya bangsa Indonesia yang merupakan *given* (anugerah) dari Tuhan Yang Maha Esa.

Tidak mudah untuk hidup dengan rukun dan damai bagi masyarakat dengan keberagaman suku, agama, ras, antargolongan (SARA) sangat tidak mudah karena sering menimbulkan gesekan atau friksi. Gesekan tersebut dapat terjadi karena latar belakang perbedaan pola pikir dan perilaku yang cenderung dilatarbelakangi perbedaan SARA sehingga memicu konflik atau perpecahan horizontal antar masyarakat. Perbedaan latar belakang tersebut membuat anggota masyarakat enggan untuk hidup menyatu dan

menggabungkan diri dengan anggota masyarakat yang berlainan latar belakang sehingga memicu berdirinya wadah-wadah organisasi kelompok sosial yang berbasiskan SARA, misalnya: Forkabi (Forum Komunikasi Anak Betawi), PBB (Pemuda Batak Bersatu), FPI (Front Pembela Islam) dan sejenisnya. Ada kecenderungan kelompok-kelompok tersebut mengagungkan budaya *primordialisme* yaitu suatu pandangan atau anggapan yang mengunggulkan dan menonjolkan budaya atau kelompok sosial tertentu bahkan mengkultuskan kelompoknya paling baik bahkan paling benar. Dengan adanya ikatan primordial yang kuat akan menyebabkan rendahnya rasa nasionalisme dan jika dibiarkan akan memudahkan terjadinya gesekan di antara masyarakat yang dapat menggerus persatuan bangsa (Nurjaman, 2021:380). Ada banyak pemberitaan negatif bahkan skeptis terhadap munculnya berbagai organisasi, misalnya kasus Ambon, Sampit, konflik antara FPI dan kelompok Achmadiyah, dan sebagainya. Peristiwa-peristiwa tersebut menyadarkan kita bahwa jika hal ini terus dibiarkan maka akan berdampak pada disintegrasi bangsa.

Sudah waktunya untuk membenahi kehidupan berbangsa dengan memberdayakan keberagaman SARA, budaya dan bahasa agar dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, salah satu solusi yang mungkin dapat diterapkan yaitu memberi perhatian terhadap pendidikan multikultural dalam sistem pendidikan di Indonesia agar peserta didik memiliki kepekaan dalam menghadapi gejala-gejala dan masalah-masalah sosial yang berakar pada perbedaan-perbedaan tata nilai di lingkungan masyarakat untuk meminimalisir konflik (Irwansyah, 2013). Perbedaan tersebut tentunya dapat dilaksanakan baik pada substansi ataupun kurikulum pembelajaran di sekolah yang mengerti, mengakui dan juga menghormati keberagaman.

Dari berbagai penomena yang ada di tengah keberagaman, masalah yang akan dibahas dalam artikel ini adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan pendidikan multikultural di tengah keberagaman masyarakat Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan pendidikan multikultural di tengah keberagaman masyarakat Indonesia?

2. Kajian Pustaka

2.1 Multikulturalisme

Menurut Rawls (1971) dalam bukunya *A Theory of Justice*, multikulturalisme merupakan perwujudan kesetaraan dalam keberagaman masyarakat dengan mengemukakan ide *social contract* yaitu hak-hak dasar dan kebebasan warga negara sebagai pribadi yang bebas dan setara. Rawls mengemukakan dua prinsip, yaitu pertama, bahwa semua masyarakat memiliki hak yang sama yang sama untuk semua orang. Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga ketidaksetaraan mestinya memberi manfaat bagi orang yang paling tidak diuntungkan, tetapi tidak merugikan orang yang sudah beruntung (Arifin, 2019). Kedua prinsip tersebut sangat cocok diterapkan di Indonesia karena menekankan pada pemberlakuan nilai-nilai sosial sehingga tercipta keadilan dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Jika hal tersebut dapat diwujudkan maka akan tercipta kerukunan di antara masyarakat yang hidup dalam keberagaman. Memberikan hak-hak dasar dan kebebasan warga negara dalam prinsip keadilan merupakan persamaan dalam kesempatan dan juga dalam prinsip perbedaan hingga kesetaraan dalam berdemokrasi.

Karena saratnya perbedaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia maka sangat diperlukan pendidikan berbasis multikulturalisme agar dapat memahami perbedaan sebagai *given* atau kekayaan bangsa yang terberi dari Tuhan Yang Maha Esa yang sepatutnya dirawat dan dikembangkan sehingga keberagaman diharapkan dapat memberi kontribusi untuk kemajuan bangsa. Namun pada kenyataannya, masih banyak ditemukan konflik SARA yang terjadi karena kurangnya pemerataan layanan pendidikan berbasis multikulturalisme pada setiap jenjang pendidikan di Indonesia (Nugraha et al., 2020); (Arif, 2015). Sudah saatnya kebijakan penerapan pendidikan berbasis multikulturalisme perlu diberlakukan pada setiap jenjang pendidikan di Indonesia secara merata untuk membangun integritas bangsa.

2.2 Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural menurut Banks (1993) merupakan gagasan yang menyatakan bahwa semua siswa, dengan tidak memperhatikan dari kelompok mana mereka berasal (jender, suku bangsa, ras, budaya, kelas sosial, agama, atau pengecualian), seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama dalam pendidikan di sekolah. Artinya, pendidikan merupakan sesuatu hal yang mutlak bahwa semua siswa diperlakukan sama, mempunyai hak yang sama tanpa memperhatikan semua perbedaan yang ada sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan damai.

Banks (1993:5) menjelaskan lima dimensi utama pendidikan multikultural, yaitu: 1) Integrasi isi yaitu bahwa dalam pembelajaran, pemberian contoh, data, dan informasi lain yang diperlukan semestinya diberikan dari perspektif berbagai budaya dengan menggabungkan kandungan materi pembelajaran ke dalam kurikulum dengan beberapa cara pandang yang beragam berdasarkan beberapa budaya atau cara pikir. Rancangan materi pembelajaran dan unit pembelajarannya tetap sama, tetapi guru memberikan tambahan beberapa unit atau topik secara khusus mengenai materi multikultural; 2) Konstruksi pengetahuan, yaitu cara pandang kita biasanya dipengaruhi oleh kebiasaan atau masyarakat di mana kita berasal. Artinya, dengan asal usul dan pengalaman yang berbeda, tentu cara pandang juga berbeda; 3) Pengurangan prasangka adalah hal yang penting, yang melibatkan pengembangan hubungan positif dan sikap toleran di kalangan siswa yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Jika melihat keberagaman asal usul, kebiasaan, budaya, dan agama, para siswa diberikan pengertian bahwa perbedaan itu memberikan warna berbeda dalam kerja tim, misalnya, sehingga keberagaman dapat dipandang sebagai kekayaan berpikir yang bisa disatukan di Lembaga Pendidikan; 4) Pedagogi keadilan merupakan cara-cara yang dipakai dalam pembelajaran di mana proses pembelajaran dipergunakan untuk memfasilitasi keberhasilan akademi siswa dari kelompok etnis dan kelas sosial yang berbeda. Dalam dunia Pendidikan, hal tersebut dapat berjalan karena pada hakekatnya semua anak berhak mendapatkan Pendidikan yang sama meskipun siswa-siswa dengan latar belakang yang berbeda, baik kelas social, asal usul, maupun budaya; 5) Budaya sekolah yang memberdayakan, yaitu suatu budaya sekolah dimana pengorganisasian dan praktik lembaga bersifat kondusif bagi pertumbuhan akademis dan emosional semua siswa. Dalam dunia Pendidikan, hal tersebut dapat berjalan karena pada hakekatnya semua anak berhak mendapatkan Pendidikan yang sama meskipun siswa-siswa dengan latar belakang yang berbeda, baik kelas social, asal usul, maupun budaya. Jadi, lembaga sekolah merupakan lembaga pendidikan yang netral yang menyediakan layanan yang sama kepada semua peserta didik.

Fios et al. (2017) menjelaskan bahwa pendidikan multikultural merupakan model pendidikan yang mempersiapkan siswa untuk menghadapi interaksi dan komunikasi antar budaya yang beragam dalam kehidupan bermasyarakat. Materi atau substansi pembelajaran menekankan pentingnya menghargai budaya lain dan menghargai sikap toleransi terhadap perbedaan budaya yang dimiliki. Hal konkrit yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan lembaga pendidikan di Indonesia mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi

perlu mengajarkan pendidikan berwawasan multikultural kepada peserta didik. Hal ini penting diwujudkan untuk memperkuat ketahanan bangsa Indonesia dari setiap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) baik dari dalam dan luar negeri.

2.3 Membangun Integritas Bangsa

Kata *integritas* (kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan kata *bangsa* artinya kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta pemerintahan sendiri, misalnya bangsa Indonesia. Maka membangun integritas bangsa dapat diartikan sebagai keadaan bangsa Indonesia secara utuh, bersatu, tanpa pengkotak-kotakan dan menjadi satu kesatuan utuh yaitu bangsa Indonesia. Wiyono (2013) mengemukakan betapa pentingnya pendidikan menghasilkan manusia Indonesia untuk mempertahankan, mengembangkan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila untuk keutuhan bangsa. Bangsa Indonesia akan menjadi besar dan kuat jika integritas bangsa terus dibangun. Hal senada juga dikemukakan oleh Dewi et al. (2021) bahwa sangat penting untuk membangun integritas nasional melalui pendidikan di sekolah, contohnya dengan mata pelajaran kewarganegaraan untuk meningkatkan kesadaran dalam kehidupan dalam keberagaman dengan menyadari banyaknya perbedaan tetapi tidak menganggap perbedaan tersebut sebagai ancaman, melainkan kekayaan bangsa.

Membangun integritas bangsa dapat dihubungkan dengan gagasan kebangsaan yang disebut Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, atau disebut juga sebagai Empat Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Keempat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, yaitu terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika (Rajagukguk et al., 2022). Dalam konsep ini, Pancasila sebagai dasar negara, atau asas berbangsa dan bernegara yang tidak dapat diganggu gugat. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan bentuk negara Indonesia. Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan keberbedaan bangsa yang terdiri dari suku, etnis, bahasa, dan agama yang majemuk tetapi dipersatukan dalam negara Indonesia (NKRI) yang mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia semuanya bersaudara. Senada dengan Rajagukguk, (Wiyono, 2013) memberikan penjelasan mengenai Empat Pilar kehidupan berbangsa sebagai patokan untuk dapat mewujudkan masyarakat adil, makmur dan bermartabat. Hal ini dapat terlihat jika persatuan bangsa dapat terwujud di tengah-tengah kemajemukan bangsa.

3. Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi Pustaka, yaitu membahas fenomena sehubungan dengan topik berdasarkan kajian ilmiah dengan melakukan beberapa cara misalnya membaca, mencatat, dan mengolah bahan-bahan penelitian yang telah dipublikasi sebelumnya baik berupa buku, artikel jurnal, maupun teks lainnya (Zed, 2017). Dengan demikian maka penulis melakukan beberapa langkah yaitu melakukan persiapan, menyiapkan bibliografi kerja, membuat jadwal kerja (timeline), membaca, mencatat, dan kemudian melakukan analisis. Jadi bukan hanya membaca saja, tetapi melakukan riset dari hasil-hasil yang dibaca (Siburian, 2013).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Pendidikan Multikultural di Indonesia Secara Umum

Pendidikan multikultural dapat digambarkan sebagai suatu pendekatan yang bertujuan untuk menyatukan bangsa dengan penekanan pada cara pandang masyarakat dengan penekanan terhadap perspektif pluralitas di tengah-tengah kelompok budaya yang berbeda. Sekolah diharapkan sebagai cerminan praktik dari nilai-nilai demokrasi dengan siswa didik yang mempunyai latar belakang berbeda, yaitu suku bangsa, etnik, agama, dan kelompok budaya. Hal tersebut membuat sekolah mencerminkan budaya yang mengedepankan praktik dan juga nilai-nilai demokrasi. Selanjutnya, kurikulum di sekolah seharusnya mencerminkan adanya kelompok budaya yang berbeda di antara masyarakat yang ada di sekolah, yang memiliki perbedaan latar belakang budaya maupun asal-usul. Melalui perbedaan tersebut, para siswa diharapkan mengedepankan rasa hormat dan persaudaraan di antara mereka. Selanjutnya kemauan untuk mengedepankan nilai-nilai kerjasama, kesatuan, dan kekompakan dibandingkan dengan persaingan dan rasa curiga di tengah-tengah perbedaan tersebut.

Jika diperhatikan dengan lebih seksama, masih banyak dijumpai sekolah-sekolah yang belum mempraktekkan Pendidikan multicultural yang seharusnya sangat tepat diterapkan di Indonesia sebagai bangsa dengan berbagai budaya, bahasa, etnis, dan agama. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan kultural belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik dan belum memiliki kurikulum yang tetap untuk mengimplementasikan pendidikan multicultural multicultural (Gunawan et al., 2022).

Pendidikan multikultural yang dilakukan seharusnya membekali siswa-siswa untuk mampu bekerja sama dan bergotong royong dalam rangka penyamaan kerangka berpikir dan termasuk di dalamnya kesamaan struktur dalam organisasi sekolah. Dengan demikian diharapkan bahwa Pendidikan multicultural merupakan arahan kebijakan yang mengedepankan pengajaran pluralism sehingga semua siswa menyadari bahwa asal usul yang berbeda dapat memperkaya khasanah budaya dan bahasa menuju kesuksesan Pendidikan di masa depan yang bahu membahu dan bergandengan tangan menuju tujuan yang direncanakan sekolah.

Secara tersirat, Pendidikan multicultural secara tidak langsung telah tersirat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan yang menyebutkan “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.” Kemudian diungkapkan kemudian bahwa “Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.” Sehubungan dengan kebijakan tersebut, pendidikan multikultural tentunya sangat sesuai diimplementasikan dalam rangka perwujudan demokratisasi karena berhubungan dengan hak asasi manusia yang perlu diakui, perlakuan setara untuk setiap warga negara, dihapuskannya praktik diskriminasi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus selalu diupayakan. Dengan demikian disintegrasikan bangsa dapat diminimalisir

Pendidikan multikultural sangat relevan dilaksanakan dalam mendukung proses demokratisasi, dimana pada pendidikan multikultural terdapat beberapa hal terkait mengenai; pengakuan hak asasi manusia, tidak adanya diskriminasi dan diupayakannya keadilan sosial. Selain itu, dengan pendidikan multikultural ini dimungkinkan seseorang dapat hidup dengan tenang di lingkungan kebudayaan yang berbeda dengan yang dimilikinya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk dan bahkan paling majemuk di dunia, karena itu agar kemajemukan ini tidak berkembang menjadi ancaman disintegrasi harus diupayakan untuk dikelola. Pendidikan merupakan salah satu jawaban utamanya.

Adapun konsep pendidikan multikultural ini merupakan proses pembelajaran yang perlu dijadikan mata pelajaran wajib di seluruh tingkatan jenjang pendidikan dan satuan pendidikan dasar sebagai titik awal proses pendidikan setiap individu. Selain itu, guru, kurikulum, sarana-prasarana, dan berbagai hal yang diperlukan untuk mendukung proses

pembelajaran multikulturalisme harus disediakan oleh negara. Dalam hal ini, negara merupakan otoritas tertinggi dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk membentuk manusia Indonesia yang bercirikan ke-Indonesia-an perlu diperkuat dalam beberapa mata pelajaran yang bersifat umum seperti Bahasa Indonesia, Sosial-Budaya Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Semua mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran yang mutlak harus diberikan untuk membentuk karakter kebangsaan (*nation character building*) manusia Indonesia agar memiliki sikap multikulturalisme yang tidak mementingkan kepentingan kelompok melainkan kepentingan bangsa seutuhnya.

4.2 Pentingnya Pendidikan Multikultural Dimulai Sejak Tingkat Satuan Pendidikan Dasar di Indonesia

Pembelajaran yang ada selama ini lebih diarahkan pada persamaan, misalnya sekolah putra yang dikhususkan untuk siswa laki-laki dan sekolah putri khusus untuk anak perempuan. Lalu yang lebih banyak lagi adalah sekolah yang berlandaskan agama tertentu, misalnya sekolah umum Islam, Kristen, Budha, dan lainnya. Ada juga sekolah-sekolah yang lebih menekankan pengetahuan agama dengan porsi yang lebih banyak dibandingkan dengan pengetahuan umum, misalnya sekolah pesantren untuk Islam dan seminari untuk Kristen dan Katolik. Sekolah yang memperkuat keimanan tanpa berdialog dengan agama lainnya menjadikan agama sangat eksklusif dan dapat memicu intileransi (Muliadi, 2012). Pengkotak-kotakan ini dapat menjadi keragaman yang memperkaya khasanah Pendidikan Indonesia, tetapi dapat juga memicu terjadinya konflik karena tidak berbaur dengan dunia luar yang mempunyai cara berpikir yang berbeda.

Pendidikan berbasis multikultural merupakan upaya membangun Indonesia yang multikultural dan dapat diwujudkan apabila konsep multikulturalisme menyebar luas dan dipahami pentingnya bagi bangsa Indonesia, serta adanya keinginan bangsa Indonesia pada tingkat nasional maupun lokal untuk mengadopsi dan menjadi pedoman hidupnya. Di samping itu diperlukan kesamaan pemahaman diantara para ahli mengenai multikulturalisme dan bangunan konsep-konsep yang mendukungnya; dan selanjutnya diperlukan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mewujudkan cita-cita tersebut (Suparlan, 2002). Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, pendidikan berbasis multikultural merupakan proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Melalui penyelenggaraan pendidikan multikultural sangat diharapkan adanya kekuatan mental

bangsa menghadapi benturan konflik sosial, sehingga persatuan bangsa tidak rapuh dan mencerahkan kehidupan bangsa ke depan.

4.3 Implikasi Pendidikan Multikultural pada Proses Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Dasar di Indonesia

Pendidikan multikultural perlu mengintegrasikan proses pembelajaran nilai, pengetahuan dan keterampilan untuk hidup dalam kehidupan masyarakat yang multikultural yang dimulai dari pengenalan, penghormatan, dan penghargaan terhadap diri sendiri. Keterampilan untuk hidup dalam kehidupan masyarakat yang berbasis multikultural yaitu bernegosiasi, mengemukakan dan menghadapi perbedaan, resolusi konflik, *cooperative learning*, dan *problem solving* (Suradi, 2018). Keterampilan ini bisa dimasukkan pada proses pembelajaran pendidikan multikultural bagi peserta didik baik melalui kegiatan akademik maupun non-akademik. Dalam implementasi pendidikan multikultural, otoritas guru perlu mengelola dan mengembangkan model pembelajaran yang efektif dengan memasukkan hakikat multikultural melalui materi pembelajaran. Hal ini perlu disikapi secara bijaksana sehingga perbedaan suku bangsa, agama, ras, maupun budaya tidak menjadikan anak untuk bersikap dan berpikiran secara primordialis. Misalnya Hanum & Raharja (2013) menawarkan model pembelajaran multikultural terintegrasi mata pelajaran IPS di SD. Model ini diharapkan dapat memberikan solusi alternatif pembelajaran yang mengedepankan perbedaan atau keragaman budaya. Hal ini perlu diberikan untuk memahami perbedaan sehingga tidak menimbulkan konflik di antara siswa-siswa yang memang berbeda suku bangsa, budaya, dan agama. Dalam penelitian tersebut, model pembelajaran multikultural tersebut diterima dengan baik oleh guru-guru dan kepala sekolah.

Proses pembelajaran yang berbasis multikultural diharapkan dapat dilaksanakan dan diimplementasikan pada kehidupan dan suasana belajar peserta didik sehingga konflik horizontal dapat diminimalisir. Oleh karena itu sangat diperlukan memahami benar hakikat perbedaan sebagai sebuah karunia (*given*) dan kekayaan bagi bangsa Indonesia dengan menjadikan perbedaan bukan menjadi pemisahan. Bila proses pembelajaran yang dijalani peserta didik tidak keluar dari konteks dan hakikat pendidikan berbasis multikultural maka sikap integritas peserta didik terhadap bangsa dan negara dapat terwujud.

5. Kesimpulan

Pendidikan berbasis multikultural perlu dikembangkan untuk mencegah dan mengatasi konflik horizontal sebagai dampak keberagaman baik dari segi budaya, agama, maupun status sosial yang ada. Pendidikan multikultural mendorong dan mengarah pada satu asumsi bahwa adanya perbedaan tidak perlu adanya pengelompokan ataupun penggolongan terhadap warga masyarakat tertentu, apalagi saling membatasi diri di antara anggota masyarakat yang berbeda tersebut. Semboyan “Bhineka Tunggal Ika” bukan hanya sebatas slogan tetapi perekat yang harus dipertahankan dan diharapkan agar dapat hidup berdampingan dan hidup harmonis. Hal ini sejalan dengan pemaparan Marta & Rieuwpassa (2018:49) bahwa kita sebagai bangsa Indonesia perlu menanamkan ajaran kasih (*epoche*) dalam melestarikan sikap hidup bertoleransi dalam masyarakat majemuk yang akan membawa keutuhan dan kesatuan bangsa.

Pendidikan multikultural merupakan model pembelajaran dengan memasukkan hakikat multikultural dalam materi pembelajaran dengan mengacu pada keanekaragaman budaya bangsa di Indonesia. Model pembelajaran ini diharapkan dapat membangun sikap peserta didik yang anti primordialis. Hanum & Raharja (2013) menawarkan model pembelajaran berbasis multikultural terintegrasi dengan mata pelajaran (misalnya IPS di SD) yang dapat memberikan solusi alternatif pembelajaran yang mengedepankan perbedaan atau keragaman budaya. Hal ini perlu diberikan untuk memahami perbedaan sehingga tidak menimbulkan konflik di antara siswa-siswa yang memang berbeda suku bangsa, budaya, dan agama. Guru sebagai fasilitator pembelajaran memiliki peran strategis untuk mengembangkan dan merencanakan proses pembelajaran yang relevan dengan unsur-unsur pendidikan multikultural.

Daftar Pustaka

- Arif, S. (2015). Pendidikan Multikultural. *Jurnal Bahas Unimed*, 26(1), 19–24.
<https://fbs.unimed.ac.id/jurusan/bahasa-asing/pend-b-jerman/>
- Arifin, Z. (2019). Dasar-Dasar Kurikulum Berbasis Multikultural: Filsafat Kurikulum yang Mengitarinya. *Jurnal Al-Insiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 135–154.
- Banks, J. A. (1993). Chapter 1: Multicultural Education: Historical Development, Dimensions, and Practice. *Review of Research in Education*, 19(1), 3–49.
<https://doi.org/10.3102/0091732X019001003>
- Dewi, D. A., Hamid, S. I., Asyari, D., Setiawati, R., & Istiqomah, Y. (2021). Implementasi

- Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mewujudkan Identitas dan Integritasi Nasional. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 5221–5226.
- Fios, F., Peter, R., & Manurung, C. (2017). Multicultural Education as A must in Indonesia (A Hermeneutic Analysis to Bina Nusantara University Student's Perceptions Towards ASEAN Community. *Advanced Scientific Lett.*
- Gunawan, R. D., Badarussyamsi, & Musa. (2022). *Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural*. 1(1), 23–41.
- Hanum, F., & Raharja, S. (2013). Pengembangan Model Pembelajaran Multikultural Terintegrasi Mata Pelajaran IPS di Sekolah Dasar. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 6(2), 39–51.
- Irwansyah, D. (2013). Pendidikan Multikultural dan Pengajaran Bahasa Asing. *ADDIN*, 7(1), 1–18. <https://doi.org/10.30957/edusiana.v4i1.3>
- Muliadi, E. (2012). Urgensi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 55–68.
- Nugraha, D., Ruswandi, U., & Erihadiana, M. (2020). Urgensi Pendidikan Multikultural Di Ndongesia. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 1(2), 140–149. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v1i2.40809>
- Nurjaman, A. (2021). Tantangan primordialisme dalam upaya membangun budaya politik nasional. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 5(2), 370–383. <https://doi.org/10.22219/satwika.v5i2.17990>
- Rajagukguk, K. J., Rulinawaty, R., & Madya, F. (2022). Strategi Pengembangan Empat Pilar Kebangsaan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Generasi Bangsa Indonesia di Provinsi Sumatera Utara. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(3), 773. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.927>
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice* (Revised). Harvard University Press.
- Siburian, T. (2013). Keilmuan Teologi dan Penelitian Kepustakaan: Refleksi Seminar Injili. *Stulos*, 12(2), 211–244.
- Suparlan, P. (2002). Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural. *Antropologi Indonesia*, 69. <http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/article/view/3448>
- Suradi, A. (2018). Pendidikan Berbasis Multikultural dalam Pelestarian Kebudayaan Lokal Nusantara di Era Globalisasi. *Wahana Akademika*, 5(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, (2003).
- Wiyono, S. (2013). Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Sebagai Panduan

dalam Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 15(1), 37–52.

Zed, M. (2017). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obir Indonesia.